

Erwan Aristyanto

**ANALISIS EFEKTIVITAS KINERJA KEUANGAN DALAM
PENGELOLAAN ANGGARAN PEMERINTAH DAN BELANJA
DAERAH PADA KOTA SURABAYA**

***ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE EFFECTIVENESS IN
MANAGEMENT OF GOVERNMENT BUDGET AND REGIONAL
EXPENDITURE IN THE CITY OF SURABAYA***

Erwan Aristyanto

Universitas Wijaya Putra

Jl. Raya Benowo 1 - 3 Surabaya

erwanaristyanto@uwp.ac.id

Diterima: 30 Oktober 2022; Direvisi: 11 Juni 2023; Disetujui: 06 Juli 2023

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effectiveness of the financial management performance of the City of Surabaya for the 2015-2019 period. This study uses a quantitative descriptive method using analysis of the influence of regional financial performance, analysis of regional financial independence, and suitability analysis (operational expenditure and capital investment). The data processed using secondary data is a summary of the 2015-2019 Regional Revenue and Expenditure Budget. The Surabaya City Government has achieved a very good level of regional financial independence, showing a delegation relationship pattern. This means that there is no interference from the central government because the regions are truly independent in carrying out regional autonomy. The effectiveness of the Surabaya City Government's financial performance from 2015 to 2019 consistently achieves the effective target, so that the level of effectiveness of the Surabaya City Government's financial management is considered effective. However, the harmony of the Surabaya City Government's financial performance has not been balanced. Based on the explanation and calculations above, the capital expenditure ratio is relatively low because most of Surabaya's funds are still used primarily for operational costs.

Keywords: *Effectiveness, regional financial performance and independence*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas kinerja pengelolaan keuangan Kota Surabaya periode 2015-2019. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis pengaruh kinerja keuangan daerah, analisis kemandirian keuangan daerah, dan analisis kesesuaian (pengeluaran operasional dan investasi modal). Data yang diolah dengan menggunakan data sekunder merupakan rangkuman anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2015-2019. Pemerintah Kota Surabaya telah mencapai tingkat kemandirian keuangan daerah yang sangat baik, menunjukkan pola hubungan delegasi. Artinya tidak ada campur tangan dari pemerintah pusat karena daerah benar-benar mandiri dalam menjalankan otonomi daerah. Efektivitas kinerja keuangan Pemerintahan Kota Surabaya tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 konsisten mencapai target efektif, sehingga tingkat efektivitas pengelolaan keuangan Pemerintahan Kota Surabaya dinilai efektif. Namun, keharmonisan kinerja keuangan Pemkot Surabaya belum seimbang. Berdasarkan penjelasan dan perhitungan di atas, rasio belanja modal relatif rendah karena sebagian besar dana Surabaya masih digunakan terutama untuk kebutuhan biaya operasional.

Kata kunci: *Efektivitas, Kinerja Pengelolaan Keuangan, Kemandirian*

PENDAHULUAN

Kinerja keuangan pemerintah daerah harus lebih diperhatikan tidak hanya oleh pemerintah pusat yang menekankan pada mereka, tetapi juga oleh masyarakat setempat, karena berkaitan dengan manfaat kesejahteraan yang mereka nikmati. Kegiatan pelayanan pemerintah daerah untuk masyarakat seringkali menarik perhatian masyarakat. Sebab, selain persepsi masyarakat terhadap manfaat yang diperoleh dari pelayanan lembaga-lembaga tersebut, seperti yang sering terjadi dalam hal ini, kegiatan mereka juga dipandang kurang optimal. Pengeluaran anggaran yang terbuang percuma, penyalahgunaan dana, dan administrasi yang tidak efisien dan tidak transparan menyebabkan kebingungan dan ketidakpuasan. Situasi ini mendorong pemerintah daerah untuk mempertimbangkan efisiensi kinerjanya dalam menjalankan mandatnya. Oleh karena itu, evaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) menjadi sangat penting. Hal ini karena memungkinkan kita untuk menentukan tingkat keuangan pemerintah daerah setiap tahun dan meningkatkan efisiensi pemerintah di tahun berikutnya.

Setelah masa Orde Baru, Indonesia mulai menerapkan otonomi daerah yang ditandai dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999, yang mengatur tentang keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Usulan Kebijakan Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2002 tentang Pelaporan Pelaksanaan Keputusan MPR RI, Presiden, DPR, DPA, BPK dan MA merekomendasikan perubahan mendasar dan menyeluruh kepada pemerintah dan DPR. Berdasarkan peraturan MPR, UU No. 22 tahun 1999 diubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 25 diubah menjadi UU No. 1999. 33 Tahun 2004. UU No. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Artinya dengan Otonomi, Pemerintahan Daerah diberi tugas dan pertanggungjawaban yang lebih banyak dalam mengurus rumah tangga daerah. Seperti dikemukakan Darumurti, Rauta (2000:49), dapat menjadi keuntungan bagi daerah jika daerah diberikan kekuasaan administratif yang begitu luas dalam rangka otonomi daerah.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada dasarnya merupakan upaya terencana untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas profesional kotamadya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta kemampuan mengelola sumber daya keuangan daerah secara efektif dan efisien. memajukan perekonomian daerah dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan daerah diharapkan dapat memberikan peluang terselenggaranya pemerintahan daerah yang baik dan efektif, efisien, inklusif, terbuka dan akuntabel. Adisasmita (2011: 33) Anggaran memiliki tiga kegunaan utama yaitu instruksi kerja, alat koordinasi kerja dan alat pemantauan kerja Anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat berjalan; Pertama, dalam perencanaan APBD, tugas perencanaan adalah menentukan tujuan yang dapat dicapai sesuai dengan pedoman yang disepakati, seperti tujuan pendapatan yang dapat dicapai, jumlah yang akan diinvestasikan dan biaya keuangan yang direncanakan. Dua fungsi koordinasi anggaran merupakan sarana untuk mengkoordinasikan rencana dan kegiatan sebagai unit atau segmen dari suatu organisasi agar dapat bekerja secara harmonis untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Fungsi komunikasi ketiga, jika Anda ingin bekerja secara efisien, dapat menyelesaikan masalah komunikasi apa pun dengan unit yang berbeda.

Erwan Aristyanto

Pada dasarnya ada dua hal yang dapat dijadikan sebagai indikator kinerja, yaitu *performance budgeting* dan *performance budgeting*. Anggaran kinerja merupakan alat yang digunakan DPRD untuk menganalisis hasil kerja pengurus daerah kotamadya, sedangkan anggaran pengelolaankinerja merupakan alat yang digunakan pimpinan daerah untuk menganalisis satuan kerja yang berada di bawah pengawasan daerah sebagai pengawas. Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah program kerja yang dilaksanakan efektif dan efisien (Mardiasmo, 2002:19). Perekonomian daerah adalah segala hak & kewajiban daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak kewajiban daerah dalam APBD (Peraturan Pemerintah No.58 bab I ayat 5 tahun 2005). Realisasi otonomi daerah membawa perubahan dalam administrasi. Kondisi ini meningkatkan kebutuhan akan pengukuran kinerja. Pengukuran ini menunjukkan berapa lama sebuah aktivitas produksi selama periode waktu tahun berjalan dibandingkan dengan rencananya. Pada pengukuran kinerja organisasi nirlaba sektor publik seperti pemerintah, diperlukan beberapa indikator untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, efektifitas sasaran dan penerapan strateginya. Menurut pendapat Halim (2007:2003), evaluasi menggunakan analisa pelaporan keuangan menggunakan indicator independensi, efisiensi dan harmoni. Menurut Djohermansyah Djohan, CEO Otta, kinerja pemerintahan dinilai dari indicator good governance, indicator kesejahteraan masyarakat, indicator pelayanan dasar dan indicator daya saing daerahnya. Indicator kesejahteraan bangsa adalah index pembangunan manusia, index pertumbuhan ekonomi dan index pengangguran. Indicator good governance antara lain, pernyataan Badan Pemeriksaan Keuangan atas pelaporan keuangan daerah dengan predikat WTP. Kota Surabaya menjadi objek kajian yang menarik melalui Badan Pengelola Perekonomian dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kota Surabaya, karena daerah tersebut terus membenahi mesin daerahnya seperti yang ditunjukkan dalam Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahunan. anggaran 2016-2019, serta porsi PAD yang cenderung meningkat. Hasil dari sektor kelautan, pertanian, kehutanan, listrik, pembangunan dan lain-lain serta pajak daerah yang diterima masyarakat diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana pusat dan meningkatkan otonomi dan diskresi daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Kinerja Keuangan

Kinerja didefinisikan sebagai unit terukur selama periode waktu yang merupakan bagian dari pengukuran prestasi kerja (Contemporary Management Accounting Dictionary, 1994). Selain itu, pengukurannya didefinisikan untuk ukuran keuangan dan nonkeuangan dari kegiatan yang dilakukan atau hasil yang telah dicapai pada proses satuan organisasi. Pengukuran kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dimana keterlibatan perguruan tinggi merupakan persyaratan dalam pengukuran data kinerja, sehingga menjadi perbaikan program berikutnya. Menurut Sedarmayanti (2003:64), “output (hasil) diartikan sebagai hasil kerja seorang pegawai, suatu proses manajemen atau keseluruhan organisasi dimana hasil kerja tersebut harus dapat diukur terhadap standar yang telah ditetapkan”. Faktor kemampuan sumberdaya mesin negara terdiri dari kemampuan potensial (IQ) dan keterampilan pengetahuan, sedangkan faktor motivasi adalah sikap (attitude) sumberdaya mesin negara tersebut dalam menyelesaikan situasi kerja. Motivasi adalah kondisi yang mengarahkan sumber daya aparatur negara untuk mencapai tujuan pemerintah, yaitu pemerintahan yang bagus.

Erwan Aristyanto

Menurut Mardiasmo (2002:121), “Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang dirancang untuk membantu manajer sektor publik mengevaluasi implementasi strategi dengan menggunakan metrik keuangan dan non-keuangan”. Menurut kamus akuntansi manajemen, kinerja adalah satuan yang diukur selama periode waktu tertentu, yang merupakan bagian dari pengukuran prestasi kerja. Pengukuran kinerja mengacu pada sistem moneter atau non-moneter hasil yang diperoleh sebagai hasil dari pekerjaan yang dilakukan atau aktivitas, proses atau unit organisasi. Kinerja kelola keuangan pemerintahan daerah adalah tingkat efisiensi di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan pengeluaran daerah selama periode anggaran dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan dengan kebijakan atau peraturan. Bentuk pengukuran kinerja adalah perhitungan APBD yang dihasilkan oleh sistem pelaporan akuntabilitas daerah sebagai indikator ekonomi utama. Menurut PP no. Menurut UU No.8 tahun2006, kinerja adalah keluaran atau hasil dari suatu kegiatan atau program yang dimaksudkan atau dicapai sehubungan dengan penggunaan serapan anggaran, yang dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Efisiensi dengan demikian mencerminkan hasil atau prestasi kerja yang mampu dicapai oleh seseorang, unit kerja dan/atau organisasi sesuai dengan mandat dan tanggung jawabnya dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuannya secara legal dan moral serta etis.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kegiatan keuangan masyarakat merupakan produksi kegiatan atau program atau hasil yang datang atau dicapai sehubungan dengan penggunaan kuantitatif anggaran daerah dan masyarakat (Sumarjo,2010). Organisasi sektor publik adalah organisasi yang tujuannya kualitasnya terukur, kapasitas daerah dapat diukur dengan mengevaluasi efisiensi pelayanan yang memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat (misalnya pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi, dll). Hasil keuangan kota diukur untuk mencapai tiga tujuan, yaitu;1. Meningkatkan efisiensi administrasi kota 2. Distribusi sumber daya dan pengambilan keputusan 3. Implementasi akuntabilitas publik dan peningkatan komunikasi kelembagaan (Mardiasmo,2002:121). Perekonomian daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, yang dapat dinilai secara finansial, termasuk segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka APBD Bab 1 Ayat 1(Peraturan pemerintah No.58 tahun2005). Realisasi otonomi daerah membawa perubahan dalam administrasi. Pemerintah daerah pada umumnya dan pelaksanaan APBD pada khususnya dapat sepenuhnya dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam Peraturan Pemerintah no. 105/2000 menjelaskan prinsip-prinsip umum pengelolaan ekonomi daerah, yang meliputi: Pertama, Pengelolaan ekonomi daerah dikelola secara terkendali, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektif, efisien dan bertanggung jawab. Kedua, Semua pendapatan dan belanja daerah tercermin dalam APBD, perubahan APBD dan perhitungan APBD. Ketiga Daerah dapat membentuk dana cadangan. Empat, Daerah dapat mencari sumber pendanaan lain selain sumber pendanaan yang sudah ada, seperti kerjasama dengan pihak lain. Lima, Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah diatur dengan APBD dalam peraturan daerah yang disusun menurut fungsinya. Peraturan pemerintah memberikan petunjuk umum kepada pemerintah kota dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD. Selain itu, daerah dituntut untuk memiliki proses penyusunan dan pelaksanaan APBD yang lebih profesional dengan pendekatan berbasis hasil. Performance budgeting adalah sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau hasil rencana distribusi biaya input yang telah ditetapkan sebelumnya (PerPu No. 105/2000). Ini juga berarti bahwa hal-hal yang dicapai harus proporsional atau lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Selain itu, penganggaran pos-pos

Erwan Aristyanto

belanja setiap APBD harus didukung dengan jaminan kecukupan pendapatan. Penyelenggaraan keuangan daerah dapat berjalan dengan lancar dan optimal, apabila penyelenggaraan urusan negara disertai dengan sumber pendapatan daerah yang memadai. Besar kecilnya distribusi sumber-sumber pendapatan daerah disesuaikan dengan pembagian kekuasaan antara negara dan pemerintahan daerah serta dikaitkan dengan perimbangan antara negara dan pemerintahan daerah. Sumber dana daerah adalah semua sumber uang yang berkaitan dengan urusan yang diserahkan kepada pemerintah daerah (Penjelasan Undang-undang Umum No. 32 Tahun 2004).

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan yang berhasil dan efektif merupakan prasyarat utama dalam meningkatkan pelayanan pada public daerah. Dalam pelaksanaannya, mengikuti prinsip kelolaan ekonomi (anggaran) daerah dengan baik. Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa lima prinsip pengelolaan ekonomi daerah diperlukan untuk memandu kebijakan ekonomi daerah, termasuk. a) tanggung jawab, entitas harus bertindak sesuai dengan kewenangan yang diterima saat mengambil keputusan. Hasil kebijakannya harus dapat dia dikomunikasikan dan diakses secara *vertikal* maupun *horizontal*. b) Price-quality ratio, prinsip operasional dalam pengelolaan ekonomi daerah dan APBD secara ekonomis, *efektif* dan *efisien* c) Kejujuran dalam pengelolaan uang negara (Integrity). Pelaksanaan kelola perekonomian daerah, pegawai yang jujur dan adil harus dapat dipercaya untuk meminimalisir kemungkinan korupsi. d) Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam menyusun kebijakan keuangan daerah sehingga DPRD dan masyarakat mengetahui dan mengontrolnya. e) Pemeriksaan, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap pendapatan dan pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di kantor keuangan daerah agar tidak terjadi pelanggaran. Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, prinsip-prinsip penting dalam penyelenggaraan perekonomian daerah, antara lain: Transparan, bertanggung jawab, berkeadilan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pasal 1, Pasal 8 UU Keuangan Publik No. 17 Tahun 2003 menyebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja provinsi disahkan oleh DPR Daerah. Dalam APBD, semua pendapatan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban wilayah dalam periode ekonomi yang bersangkutan harus tercermin. APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah, yang di satu sisi menggambarkan anggaran biaya untuk pembiayaan kegiatan dan proyek daerah selama satu tahun anggaran, dan di sisi lain, pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran anggaran. Semua pendapatan dan belanja daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Pendapatan dan biaya daerah yang terkait dengan pelaksanaan tugas desentralisasi. Namun, pendapatan dan biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi atau tugas pengelolaan bersama tidak ditampilkan dalam APBD. Pentingnya Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD) disebabkan oleh beberapa hal. a) APBD merupakan program aksi dan kebijakan daerah yang dilaksanakan selama satu tahun laporan. b) APBD menentukan perkiraan jumlah pajak yang akan dipungut dari penduduk daerah tersebut. c) APBD merupakan alat untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. d) APBD memberikan isi dan makna tanggung jawab pemerintah daerah pada umumnya dan pemerintah daerah pada khususnya. e) APBD adalah sarana untuk mengendalikan bidang pengelolaan ekonomi daerah dalam batas-batas tertentu. Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, dimana APBD menjadi dasar pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan kantor keuangan daerah. APBD

Erwan Aristyanto

merupakan alat yang berperan penting dalam meningkatkan pelayanan publik dan mencerminkan kebutuhan masyarakat, mengingat potensi dan sumber kemakmuran daerah. APBD memiliki fungsi kewenangan, perencanaan, pengendalian, distribusi dan stabilitas (Nordiaeanet Al, 2007). Administrasi ditangani oleh pemegang kekuasaan dewan keuangan daerah. Sebagai kepala pemerintahan provinsi, Kepala Daerah merupakan pemegang kewenangan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah provinsi dalam kepemilikan kekayaan daerah tertentu. Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah Indonesia, yang disetujui oleh DPRDaerah.

Pendapatan Daerah

Penerimaan daerah adalah semua Penerimaan yang diterima melalui rekening kas umum daerah, yang sejak satu (satu) tahun buku ditambahkan ke dalam modal saham dari dana berjalan yang menjadi hak satuan pemerintahan daerah dan tidak perlu disetor oleh negara penggantian (UU No. 33) sejak 2004. Penerimaan daerah adalah hak pemerintah daerah yang harus tercermin dalam peningkatan kekayaan bersih pada periode yang bersangkutan. Menurut Undang-Undang Perimbangan Keuangan Negara dan Daerah No. 33 Tahun 2004, menurut pendapat daerah, pendapat daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih pada periode yang bersangkutan, pendapatan daerah terdiri dari: 1. Pendapatan asli daerah, Pemerintah daerah memungut pendapatan utama daerah menurut peraturan daerah, dan sumber pemungutannya adalah: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan investasi daerah tersendiri, pendapatan daerah primer lain yang sah. 2. Dana pemerataan, dana perimbangan adalah dana yang berasal dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi. Tujuan dari dana tersebut adalah untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah negara bagian dan daerah dan kota daerah. Pendapatan daerah lain yang berlaku termasuk hibah atau subsidi pemerintah. Dana darurat pemerintah untuk menangani korban bencana alam atau kerusakan, dana bagi hasil pajak dari dana adaptasi kabupaten/kota, bantuan keuangan dari teknis atau pemerintah daerah lainnya. a. anggaran belanja yang digunakan untuk memenuhi pajak pemerintah daerah. b) Pendanaan, yaitu. semua penghasilan dan/atau pengeluaran yang dapat diganti yang dikembalikan baik pada tahun buku yang bersangkutan maupun pada periode buku berikutnya, periode pembukuan APBD mencakup periode satu tahun, dimulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember.

Pembiayaan/Belanja Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua pendanaan atau pengeluaran yang dapat diganti baik pada tahun anggaran yang saat ini maupun pada anggaran tahun depan. Pendanaan daerah hanya dapat ditemukan dalam rencana kerja anggaran(RKA) dan dewan tertinggi satuan kerja perangkat daerah bidang pengelolaan keuangan (SKPD), dibagi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis pembiayaan Pembiayaan terdiri dari pendapatan keuangan dan beban keuangan Pendapatan keuangan adalah: surplus akuntansi anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA), mencari dana dan cadangan, pendapatan dari penjualan kekayaan daerah yang terpisah, penerimaan pinjaman daerah, pelunasan pinjaman bantuan dan penerimaan tagihan daerah. Pengeluaran keuangan adalah: pembentukan dana cadangan, ekuitas kota (investasi), pembayaran modal asing dan pemberian pinjaman daerah. Pembiayaan bersih adalah selisih antara pendapatan pembiayaan dan biaya pembiayaan. Jumlah pembiayaan bersih harus mampu menutupi defisit anggaran. Surplus anggaran tahun

Erwan Aristyanto

anggaran sebelumnya (SILPA) berisi sisa dana untuk membiayai kegiatan tindak lanjut hasil efisiensi biaya dan melebihi target pendapatan daerah. Pendapatan dari penjualan aset tersendiri dapat berupa penjualan perusahaan daerah atau badan usaha milik negara (BUMN) dan penjualan aset milik pemerintah provinsi yang bekerjasama dengan pihak ketiga, atau pendapatan investasi. Perhitungan modal daerah yang termasuk dalam hasil pinjaman adalah penerbitan obligasi daerah yang direalisasikan pada tahun anggaran yang diinginkan.

Pembiayaan/Belanja Pembangunan

Mardiasmo (2009:66) menyatakan bahwa belanjapemerintah yang digunakan baik oleh negara maupun pemerintah daerah meliputi dua jenis, belanja rutin&belanja modal. Investasi adalah pengeluaran yang diprakarsai oleh pemerintah yang nantinya dapat menambah kekayaan negara dan dirasakan selama lebih dari satu tahun anggaran. Investasi meliputi investasi pada peralatan dan mesin, investasi pada bangunan dan fasilitas, investasi pada jaringan jalan dan irigasi, dan investasi pada real estate, dll. Pengeluaran yang membiayai baik programpembangunanfisik seperti jalan, jembatan, gedung& pembelian kendaraan maupun pembangunan mental non fisik seperti melanjutkan pendidikan dll, agar anggaran tersebut selalu berhasil dibelanjakan, dana ini dialokasikan ke berbagai sektor sesuai dengan prioritas salinan yang diusulkan. Misalnya pada PelitaI pembangunan difokuskan pada sektor pertanian dan industri yang mendukung pertanian, dan pada Pelita II fokusnya masih pada sektor pertanian untuk meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan mentah, dsb. Selain pembiayaan biaya khusus industri, proyek khusus daerah, proyek Inpres, juga dibiayai dengan biaya pengembangan antar unit/lembaga. Keduanya dilaksanakan oleh negara dan masing-masing daerah. Tujuan bantuan pembangunandaerah adalah untuk mencerminkan prinsip pemerataan pembangunan antar daerah dan memenuhi keinginan pemerintah untuk mendorong pemerintah daerah mengembangkan kemampuan pembangunan daerahnya. Selain itu, dengan menawarkan bantuan pembangunan daerah, kami ingin mendorong inisiatif dan partisipasi masyarakat yang tinggal di daerah secara lebih tulus dan bertanggung jawab. Besar kecilnya alokasi anggaran bantuan pembangunan daerah dipengaruhi oleh kemampuan keuangan negara dan beberapa faktor adaptasi daerah seperti jumlah penduduk dan ukuran wilayah. Proyek yang dibangun dengan cara ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah sesuai perkembangan daerah lain. Lembaga selalu terlibat dalam perencanaan agar proyek2 pembangunan yang dibiayai oleh dukungan pembangunan daerah lebih memenuhi kebutuhan dan kondisi masingmasing daerah dan mendukung proyekproyek pembangunan lainnya ketika merencanakan program dan proyek pembangunandaerah.

Perencanaan Pembangunan Daerah Tiap Daerah (Bappeda) (Djamin,1993:73) Ichwan (1997:27) mendefinisikan belanja pembangunan sebagai berikut: “Belanja pembangunan adalah belanja pemerintah yang tidak dapat dibelanjakan baik sebagai investasi fisik maupun non fisik (proyek),sedangkan menurut Baswiri (1997:45), belanja pembangunan adalah: belanja sektor publik yang bersifat investasi dan digunakan sebagai salah satu agen pembangunan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Biaya pengembangan meliputi biaya pengembangan dalam rupiah dan hibah proyek yang dibiayai oleh pinjaman atau hibah luar negeri. Pengeluaran pembangunan dalam mata uang rupiah berasal dari tabungan pemerintah dan bantuan program untuk membiayai pengeluaran khusus sektor melalui lembaga di luar departemen atau unit dan juga digunakan untuk membiayai proyek. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa biaya pembangunan adalah semua biaya penyelenggaraan

Erwan Aristyanto

pemerintahan daerah dalam satu periode anggaran sebagai biaya pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban masyarakat dan negara.

Dengan latar belakang permasalahan tersebut di atas, dalam kaitannya dengan tanggung jawab, sebagai pemangku kepentingan badan keuangan daerah, perlu diperhatikan agar sumber daya keuangan yang tersedia digunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang berhubungan langsung dengan perpajakan. berlatih kotamadya harus. *Efisiensi* dan *efektivitas* Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Surabaya adalah soal optimalisasi anggaran secara efektif dan efisien.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk mengetahui kinerja keuangan APBD Pemerintah Kotamadya Surabaya ditinjau dari kemandirian keuangan daerah, efisiensi dan keserasian PAD. Fokus penelitian ini adalah kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2015-2019 dan kinerja keuangan Pemerintah Kotamadya Surabaya tahun 2015-2019. Informasi tersebut diperoleh dari publikasi laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya periode 2015-2019 yang diambil dari tautan surabaya.go.id. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua aktifitas yaitu; a) Meminta bahan penelitian kepada Pemerintah Daerah Kota Surabaya atas nama Badan Pengelola Perekonomian dan Keuangan Daerah yang menitikberatkan pada analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan APBD Kota madya Surabaya tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. b) Menghitung analisis rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya periode 2015-2019.

Adapun analisis rasio yang di gunakan adalah:

- a) Analisis efektivitas

$$\text{efektivitas PAD} = \frac{\text{realisasi penerimaan PAD}}{\text{target penerimaan PAD}} \times 100\%$$

- b) Analisis kemandirian keuangan daerah

$$\text{kemandirian} = \frac{\text{pendapatan asli daerah}}{\text{transfer pusat} + \text{propinsi} + \text{pinjaman}} \times 100\%$$

- c) Analisis keserasian

$$\text{belanja operasi} = \frac{\text{total belanja operasi}}{\text{total belanja daerah}} \times 100\%$$

$$\text{belanja modal} = \frac{\text{total belanja modal}}{\text{total belanja daerah}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.
Data Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Asset Daerah Surabaya Tahun 2015
Tahun

No	Uraian	2015
1.	PAD(pendapatan asli daerah)	3.782.647.234.297.00
2.	Transfer pusat	1.510.882.244.633.00
3.	Total belanja operasi	5.428.264.664.366.00

Erwan Aristyanto

4.	Total belanja daerah	7.928.337.395.393.00
5.	Realisasi penerimaan PAD	4.035.649.478.397.97
6.	Target penerimaan PAD	3.782.647.234.297.00
7.	Transfer daerah	860.900.038.444.00

Sumber: Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Asset Daerah Surabaya

Tabel 2.
Data tahun 2016 - 2017

No	Uraian	Tahun	
		2016	2017
1.	PAD(pendapatan asli daerah)	3.944.467.129.125,00	4.709.645.546.043,00
2.	Transfer pusat	1.795.430.214.560.00	2.174.478.926.178,00
3.	Total belanja operasi	5.960.102.058.775,00	6.101.584.614.463,00
4.	Total belanja daerah	5.970.102.058.775,00	6.111.584.614.463,00
5.	Realisasi penerimaan PAD	4.090.206.769.387,53	5.161.844.571.171,67
6.	Target penerimaan PAD	3.944.467.129.125,00	4.709.645.546.043,00
7.	Transfer daerah	975.404.199.804.00	970.748.732.137,00

Sumber: Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Asset Daerah Surabaya

Tabel 3.
Data tahun 2018 - 2019

No	Uraian	Tahun	
		2018	2019
1.	PAD(pendapatan asli daerah)	4.758.967.236.960.00	5.234.687.226.266,00
2.	Transfer pusat	2.197.705.635.699.00	2.314.200.840.849,00
3.	Total belanja operasi	6.529.097.519.297.00	6.965.363.908.606,00
4.	Total belanja daeah	9.117.196.864.653	6.978.626.490.106.00
5.	Realisasi penerimaan PAD	4.973.031.004.727.10	5.381.920.253.809,67
6.	Target penerimaan PAD	4.758.967.236.960.00	5.234.687.226.266,00
7.	Transfer daerah	894.106.721.609.00	905.466.115.619,00

Sumber: Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Asset Daerah Surabaya

Tabel 4.
Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2015-2019
Pendapatan

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2015	6.642.257.716.374.00	6.619.031.160.936.97	99,65

Erwan Aristyanto

2016	6.720.301.543.490,00	6.825.754.275.891,53	101,57
2017	7.904.894.969.358,00	8.033.573.163.669,67	101,63
2018	8.079.142.194.268,00	8.175.219.120.669,10	101,19
2019	8.733.224.623.734,00	8.765.153.020.782,67	100,37

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya

Tabel tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Daerah Kota Surabaya mengalami naik turun yaitu pendapatan tahun 2015 yaitu 99,65% kurang dari target yang di anggarkan. Realisasi pendapatan pada tahun 2016 mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu terealisasi 101,57%. Selanjutnya di tahun 2017 realisasi pendapatan mengalami naik kembali, terealisasi sebesar 101,63%) dari tahun sebelumnya danrealisasi di tahun 2018 kembali mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 101,19 %) dan di tahun 2019 mengalami kenaikan yaitu sebesar 100,37%.

Tabel 5.
Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2015-2019
Belanja

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2015	7.928.337.395.393,00	6.490.359.759.532,00	81,86
2016	8.115.231.350.395,00	7.151.661.549.430,48	88,13
2017	8.963.930.686.060,00	7.912.409.152.257,09	88,27
2018	9.268.450.333.673,00	8.176.292.496.298,63	88,22
2019	9.933.509.442.785,00	9.162.655.939.831,57	92,24

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya

Berdasarkan tersebut menunjukkan bahwa Belanja Daerah Kota Surabaya dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi dimana belanja pada tahun 2015 terealisasi sebesar 81,86%, tahun 2016 terealisasi sebesar 88,13%. sedangkan pada tahun 2017 belanja terealisasi sebesar 88,27%. Selanjutnya di tahun 2018 realisasi belanja mengalami penurunan sebesar 88,22% dari yang dianggarkan, dan pada tahun 2019 belanja mengalami peningkatan yaitu sebesar 92,24%.

“Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya ditinjau dari Segi Efektivitas’

Mengukur tingkat efektivitas dianggap efektif apabila organisasi, program atau kegiatan yang dihasilkan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, semakin efektif organisasi, program atau kegiatan tersebut. Jika hasilnya lebih dari 100% maka dapat dikatakan anggaran tersebut sangat efektif. Jika hasilnya 90-100%, anggaran efektif. Jika hasilnya antara 80%-90%, maka anggaran tersebut dikatakan cukup efektif, dan jika hasilnya antara 60%-80%, maka anggaran tersebut dapat dikatakan tidak efektif. Jika hasilnya kurang dari 60 persen dari anggaran, maka dikatakan tidak efektif. Perhitungan tingkat efisiensi didasarkan pada Laporan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2015-2019.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Pendapatan}}{\text{Target Anggaran Pendapatan}} \times 100 \%$$

Belanja yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya pada tahun anggaran 2015-2019 sebagai berikut:

a. Tahun 2015

$$\text{Efektivitas} = \frac{6.619.031.160.936,97}{6.642.257.716.374,00} \times 100\% \\ = 99,65\%$$

Pada tahun 2015, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya memiliki rasio efisiensi anggaran sebesar 99,65%, yang berarti Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya sudah diperhitungkan. dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja secara efektif. Artinya, kinerja pemerintah tahun 2015 menunjukkan hasil yang baik, yaitu anggaran pendapatan sebesar Rp6.619.031.160.936,97 yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan pendapatan daerah lainnya yang sah, lebih tinggi dari target pendapatan dari target anggaran yaitu . Rp. 6.642.257.716.374,00 yang terdiri dari pendapatan daerah, pendapatan transfer dan pendapatan daerah wajib lainnya. Bagian yang paling terkena dampak dari pelaksanaan anggaran pendapatan atau pendapatan asli daerah (PAD), karena penerimaan PAD tahun 2015 sebesar Rp3.782.647.234.297,00. Bagian yang paling berpengaruh terhadap penerimaan PAD adalah penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 2.679.368.000.000,00 Di antara unsur-unsur target anggaran pendapatan, pendapatan asli daerah adalah yang paling terpengaruh. Kota dianggap berhasil jika dapat melaksanakan anggaran pendapatan lebih tinggi dari target pendapatan yang ditetapkan dan biaya pelaksanaan anggaran lebih rendah dari target anggaran.

b. Tahun 2016

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp } 6.825.754.275.891,53}{\text{Rp } 6.720.301.543.490,00} \times 100\% \\ = 101,56\%$$

Pada tahun 2016, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya memiliki rasio efisiensi anggaran sebesar 101,56%, yang berarti Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya sudah diperhitungkan. sangat efisien dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja. Artinya kinerja pemerintah tahun 2016 sangat baik yaitu anggaran pendapatan sebesar Rp. 6.825.754.275.891,53 yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan pendapatan daerah lain yang sah, lebih tinggi dari target anggaran pendapatan target sebesar Rp. 6.720.301.543.490,00 yang terdiri dari pendapatan daerah, pendapatan transfer dan pendapatan daerah wajib lainnya. Bagian realisasi anggaran pendapatan atau pendapatan asli daerah (PAD) paling terpengaruh karena pendapatan PAD (2016) sebesar Rp. 3.944.467.129.125,00. Bagian yang paling berpengaruh terhadap penerimaan PAD adalah penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 2.802.516.278.889,00 Bagian target anggaran pendapatan yang paling berpengaruh yaitu pendapatan asli daerah. Kota dianggap berhasil jika dapat melaksanakan anggaran pendapatan lebih tinggi dari target pendapatan yang ditetapkan dan biaya pelaksanaan anggaran lebih rendah dari target anggaran.

c. Tahun 2017

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp } 7.904.894.969.358,00}{\text{Rp } 8.033.573.163.669,67} \times 100\% \\ = 98,39\%$$

Pada tahun 2017, rasio efisiensi pelaksanaan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya sebesar 98,39%, yang berarti Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya sudah diperhitungkan. dalam mengelola anggaran pendapatan dan

Erwan Aristyanto

belanja secara efektif. Pada tahun 2017, rasio efisiensi pendapatan dan belanja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya sebesar 98,39%, yang berarti bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya tergolong efisien dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanjanya. Artinya, kinerja pemerintah tahun 2017 menunjukkan hasil yang baik yaitu realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp. 8.033.573.163.669,67 yang terdiri dari pendapatan utama daerah, pendapatan transfer dan pendapatan daerah wajib lainnya yang hampir mendekati target anggaran pendapatan target sebesar Rp. 7.904.894.969.358,00 yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan pendapatan daerah wajib lainnya. Bagian yang paling terpengaruh oleh realisasi anggaran pendapatan, yaitu. pendapatan asli daerah (PAD), karena penerimaan PAD tahun 2017 sebesar Rp. 4.709.645.546.043,00. Bagian pendapatan awal daerah yang ditambahkan itu adalah penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 3.265.955.423.267,00. Diantara elemen target anggaran pendapatan, pendapatan PAD yang paling terpengaruh, karena pada tahun 2017 pendapatan PAD sebesar Rp. 3.265.955.423.267,00. Kota dianggap berhasil jika dapat melaksanakan anggaran pendapatan lebih tinggi dari target pendapatan yang ditetapkan dan biaya pelaksanaan anggaran lebih rendah dari target anggaran.

d. Tahun 2018

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp.8.079.142.194.268.00}}{\text{Rp.8.175.219.120.669.10}} \times 100\% \\ = 98.82\%$$

Pada tahun 2018, rasio efisiensi pelaksanaan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya sebesar 98,82%, yang berarti Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya sudah diperhitungkan. dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja secara efektif. Pada tahun 2018, Biro Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya memiliki rasio efisiensi pelaksanaan anggaran sebesar 98,82%, yang berarti bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya dinilai efektif dalam mengelola pendapatan dan aset. anggaran belanja Artinya, kinerja pemerintah tahun 2018 menunjukkan hasil yang baik atau anggaran pendapatan sebesar Rp8.175.219.120.669,10 yang terdiri dari pendapatan utama daerah, pendapatan transfer dan pendapatan daerah sah lainnya yang hampir mendekati target sasaran anggaran yaitu sebesar Rp. 8.079.142.194.268,00 yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan pendapatan daerah lain yang sah. Dalam pelaksanaan anggaran pendapatan yaitu dalam pelaksanaan anggaran pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan yang paling berpengaruh pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 4.758.967.236.960,00. Bagian pendapatan awal daerah yang ditambahkan itu adalah penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 3.615.432.902.416,00. Diantara elemen target anggaran pendapatan, pendapatan PAD yang paling terpengaruh, karena pada tahun 2018 pendapatan PAD sebesar Rp. 3.615.432.902.416,00. Kota dianggap berhasil jika dapat melaksanakan anggaran pendapatan lebih tinggi dari target pendapatan yang ditetapkan dan biaya pelaksanaan anggaran lebih rendah dari target anggaran.

e. Tahun 2019

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp.8.733.224.623.734,00}}{\text{Rp.8.765.153.020.782,67}} \times 100\% \\ = 99.63\%$$

Erwan Aristyanto

Pada tahun 2019, rasio efisiensi pelaksanaan anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya sebesar 99,63%, yang berarti Badan dan Aset Daerah Kota Surabaya telah diperhitungkan. dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja secara efektif. Pada tahun 2019, rasio efisiensi pelaksanaan anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya sebesar 99,63%, yang berarti Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya telah diperhitungkan. dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja secara efektif. Artinya penyelenggaraan pemerintahan tahun 2019 menunjukkan hasil yang baik, anggaran pendapatan negara sebesar Rp 8.765.153.020.782,67 yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan pendapatan asli daerah lainnya yang hampir mendekati target anggaran pendapatan yang telah ditetapkan. Sasarannya adalah Rp 8.733.224.623.734,00 yang terdiri dari pendapatan daerah, pendapatan transfer dan pendapatan daerah lain yang sah. Unsur pelaksanaan anggaran pendapatan atau pendapatan asli daerah (PAD) yang paling berpengaruh, karena pada tahun 2019 penerimaan PAD sebesar Rp. 5.234.687.226.266,00. Komponen yang lebih besar pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah adalah penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 4.008.794.324.904,00. Diantara elemen target anggaran pendapatan, pendapatan PAD yang paling terpengaruh, karena pada tahun 2019 pendapatan PAD sebesar Rp. 4.008.794.324.904,00. Kota dianggap berhasil jika dapat melaksanakan anggaran pendapatan lebih tinggi dari target pendapatan yang ditetapkan dan biaya pelaksanaan anggaran lebih rendah dari target anggaran.

Tabel 6.
Pengukuran Tingkat Efektivitas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya tahun 2015-2019

Tahun	Rasio efektivitas	Kriteria
2015	99.65%	Efektif
2016	101.56%	Sangat efektif
2017	98.39%	Efektif
2018	98.82%	Efektif
2019	99.63 %	Efektif

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya

‘Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya ditinjau dari Segi Kemandirian Keuangan Daerah’

$$\text{Kemandirian} = \frac{\text{pendapatan asli daerah}}{\text{transfer pusat} + \text{profinsi} + \text{pinjaman}} \times 100\%$$

a. Tahun 2015

$$\text{Kemandirian} = \frac{3.782.647.234.297,00}{2.834.807.600.077,00} \times 100\% = 133\%$$

b. Tahun 2016

$$\text{Kemandirian} = \frac{3.944.467.129.125,00}{2.770.834.414.365,00} \times 100\% = 142\%$$

c. Tahun 2017

$$\text{Kemandirian} = \frac{4.709.645.546.043,00}{3.145.227.658.315,00} \times 100\%$$

$$= 149\%$$

d. Tahun 2018

$$\text{Kemandirian} = \frac{4.758.967.236.960,00}{3.091.812.357.308,00} \times 100\% \\ = 153\%$$

e. Tahun 2019

$$\text{Kemandirian} = \frac{5.234.687.226.266,00}{3.219.666.956.468,00} \times 100\% \\ = 162\%$$

Tabel 7.
Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Surabaya
Total pendapatan

Tahun	PAD	Transfer	RKKD(%)	Keterangan
2015	3.782.647.234.297,00	2.834.807.600.077,00	133%	Delektif
2016	4.709.645.546.043,00	2.770.834.414.365,00	142 %	Delektif
2017	4.709.645.546.043,00	3.145.227.658.315,00	149 %	Delektif
2018	4.758.967.236.960,00	3.091.812.357.308,00	153 %	Delektif
2019	5.234.687.226.266,00	3.219.666.956.468,00	162 %	Delektif

Sumber: Data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya

Dari tabel tahun 2016 terlihat proporsi kemandirian ekonomi daerah sebesar 142%, pada tahun 2017 proporsi kemandirian ekonomi daerah meningkat sebesar 7% yang ditunjukkan pada tabel tahun 2017 yaitu sebesar 149% pada tahun 2018, juga meningkat, tetapi tidak banyak, pada tahun 2018, yang ditunjukkan pada tabel di atas hanya 4%, yaitu. pada tahun 2019 sebanyak 153 mengalami peningkatan sebesar 9%. Menurut Halim, kemandirian ekonomi daerah Pemkot Surabaya sudah mencapai tingkat yang sangat baik, yang menunjukkan model hubungan delegasi, artinya pemerintah pusat tidak ikut campur, karena daerah benar-benar mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. otonomi. Melihat tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi persentasenya maka semakin baik kemandirian ekonomi daerah.

‘Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya ditinjau dari Keserasian’

1. Belanja Modal

$$\text{belanja modal} = \frac{\text{total belanja modal}}{\text{total belanja daerah}} \times 100\%$$

a. Tahun 2015

$$\text{belanja modal} = \frac{2.486.345.703.617,00}{7.928.337.395.393,00} \times 100\% \\ = 31.3\%$$

b. Tahun 2016

$$\text{belanja modal} = \frac{2.144.518.665.570,00}{8.115.231.350.395,00} \times 100\% \\ = 26.4\%$$

c. Tahun 2017

$$\text{belanja modal} = \frac{2.844.371.811.527,00}{8.963.930.686.060,00} \times 100\% = 31.7\%$$

d. Tahun 2018

$$\text{belanja modal} = \frac{2.720.098.071.386.00}{9.268.450.333.673.00} \times 100\% = 29.3\%$$

e. Tahun 2019

$$\text{belanja modal} = \frac{2.952.664.659.049,00}{9.933.509.442.785,00} \times 100\% = 29.7\%$$

Tabel 8.
Keserasian (Belanja Modal)

Tahun	Total belanja modal	Total belanja daerah	belanja modal
2015	2.486.345.703.617.00	7.928.337.395.393.00	31.3%
2016	2.144.518.665.570,0	8.115.231.350.395,00	26.4%
2017	2.844.371.811.527,00	8.963.930.686.060,00	31.7%
2018	2.720.098.071.386.00	9.268.450.333.673.00	29.3%
2019	2.952.664.659.049,00	9.933.509.442.785,00	29.7%

Sumber: Data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya

2. Belanja Operasi

$$\text{belanja operasi} = \frac{\text{total belanja operasi}}{\text{total belanja daerah}} \times 100\%$$

a. tahun 2015

$$\text{belanja operasi} = \frac{5.428.462.664.366.00}{7.928.337.395.393.00} \times 100\% = 68.4\%$$

b. tahun 2016

$$\text{belanja operasi} = \frac{5.960.102.058.775,00}{8.115.231.350.395,00} \times 100\% = 73.4\%$$

c. tahun 2017

$$\text{belanja operasi} = \frac{6.101.584.614.463,00}{8.963.930.686.060,00} \times 100\% = 68.0\%$$

d. tahun 2018

$$\text{belanja operasi} = \frac{6.529.097.519.297.00}{9.268.450.333.673.00} \times 100\% = 70.4\%$$

e. tahun 2019

$$\text{belanja operasi} = \frac{6.965.363.908.606,00}{9.933.509.442.785,00} \times 100\% = 70.1\%$$

Tabel 9.
Keserasian (Belanja Operasi)

Tahun	Total belanja operasi	Total belanja daerah	belanja operasi
2015	5.428.462.664.366,00	7.928.337.395.393,00	68.4%
2016	5.960.102.058.775,00	8.115.231.350.395,00	73.4%
2017	6.101.584.614.463,00	8.963.930.686.060,00	68.0%
2018	6.529.097.519.297,00	9.268.450.333.673,00	70.4%
2019	6.965.363.908.606,00	9.933.509.442.785,00	70.1%

Sumber: Data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya

Berdasarkan uraian dan perhitungan di atas, sebagian besar dana milik Pemkot Surabaya masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasional, sehingga proporsi aset tetap relatif kecil. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata rasio beban usaha yang masih tinggi dibandingkan dengan rata-rata rasio aktiva tetap. Besarnya biaya operasional tersebut terutama disebabkan oleh banyaknya lembaga mandiri dan biaya personal untuk gaji pegawai negeri. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kota Surabaya lebih mementingkan biaya rutin dalam melakukan kegiatan pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Kajian yang dilakukan oleh Wahyuddin dan Nora Sugianal (2017) menjelaskan bahwa kinerja perekonomian Kota Lhokseumawe ditinjau dari keharmonisan hubungan masih labil karena selalu mengalami peningkatan atau penurunan pada setiap periodenya. Hampir sama dengan penelitian ini, dimana kinerja keuangan pemerintah kota Surabaya dalam hal keharmonisan hubungan masih labil.

KESIMPULAN

“Kinerja Keuangan Daerah Kota Surabaya Berdasarkan Efektivitas ‘

Efisiensi ekonomi daerah diperoleh dengan membandingkan realisasi pendapatan awal daerah dengan target pendapatan daerah. Hasil perhitungan efisiensi ekonomi daerah ditunjukkan pada tabel efisiensi ekonomi daerah tahun 2015 sebesar 99,65 persen yang merupakan kriteria efektif. kemudian mengalami peningkatan omzet daerah pada tahun 2016 sehingga hasil perhitungan efisiensi sebesar 101,56 persen tergolong sangat efisien menurut kriteria pengukuran, karena tingkat diatas 100 persen dikatakan sangat efisien. Namun pada tahun 2017, efisiensi perekonomian daerah baik pajak daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan keuangan yang dialokasikan dan pendapatan daerah lainnya yang sah melemah sehingga hasil perhitungan efektif termasuk kategori aktual 98,39 persen dan merupakan yang terendah. efisiensi pada periode 2015-2019. Artinya, kemampuan pemerintah daerah untuk menerima pendapatan sesuai target naik turun. Selain itu, pada tahun 2018 pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan aset yang ditugaskan dan pendapatan daerah sementara lainnya mengalami peningkatan, namun seperti terlihat pada hasil perhitungan efisiensi pada Tabel 4.6 meningkat menjadi 98,82% tergolong efektif dan menjadi 99,63. % tahun 2019 efektif, karena target pendapatan asli daerah juga meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan pencapaian target pendapatan asli daerah Kota Surabaya tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 telah mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa efisiensi ekonomi kawasan perkotaan Surabaya cenderung mencapai tujuan efisiensi. Dari

Erwan Aristyanto

tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 efisiensi perekonomian daerah Kota Surabaya berada pada kategori efisien yang berarti kemampuan daerah Kota Surabaya dalam melaksanakan tugasnya sudah baik.

Kinerja Keuangan Daerah Kota Surabaya Berdasarkan Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan disajikan pada Tabel Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah Kota Surabaya. Kemandirian ekonomi daerah diperoleh dengan membandingkan pendapatan awal daerah dengan bantuan negara. Hasil perhitungan pada Tabel 4.7 menunjukkan bahwa kemandirian kota Surabaya tahun 2015-2019 terus berkembang. Pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 kemandirian ekonomi daerah meningkat pada tahun 2015 sebesar 142%, pada tahun 2016 proporsi kemandirian ekonomi daerah meningkat sebesar 7%, yang pada tabel tahun 2017 yaitu sebesar 149%. . . , tahun 2018 juga ada peningkatan, namun tidak banyak, hanya 4%, seperti terlihat pada tabel di atas pada tahun 2018, artinya pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 9% di tahun 153. Menurut Halim, kemandirian ekonomi daerah Pemerintah Kota Surabaya telah mencapai tingkat yang sangat baik, yang menunjukkan model hubungan delegasi, artinya pemerintah pusat tidak ikut campur, karena daerah benar-benar mandiri dalam pelaksanaan otonomi daerah. Melihat tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi persentasenya maka semakin baik kemandirian ekonomi daerah. Terlihat dari tabel bahwa pendapatan asli daerah kota Surabaya meningkat setiap tahunnya, namun diikuti oleh dana perimbangan yaitu. transfer pemerintah, yang berbeda dari tahun ke tahun. Tahun 2015 Rp. 2.834.807.600.077,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.837.704.414.365,00 pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp. 3.145.227.658.315,00, pada tahun 2018 turun menjadi Rp. 3.091.812.357.308,00 dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.219.666.956.468,00, sehingga Kota Surabaya masih belum mandiri untuk membiayai sendiri segala kegiatan administrasinya. Selain itu, dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah seperti membayar pajak dan pembayaran tidak meningkat secara signifikan. Besarnya pendapatan pajak daerah dan kompensasi sebenarnya menunjukkan bahwa pemerintah kota menggunakan pendapatan pajak sebagai sumber pendapatan PAD, yang kemudian digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Tingginya penerimaan pajak dan retribusi daerah menunjukkan bahwa pemerintah kota yakin dapat memanfaatkan potensi daerah secara maksimal, sehingga penerimaan pajak kota meningkat.

Kinerja Keuangan Daerah Kota Surabaya Berdasarkan Keserasian (Belanja Modal dan Belanja Operasi)

Berdasarkan tabel investasi aset tetap dan beban usaha tahun 2015-2019, beban usaha lebih besar dari investasi. Berdasarkan uraian dan perhitungan di atas, sebagian besar dana milik Pemkot Surabaya masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasional, sehingga proporsi aset tetap relatif kecil. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata rasio beban usaha yang masih tinggi dibandingkan dengan rata-rata rasio aktiva tetap. Besarnya biaya operasional tersebut terutama disebabkan oleh banyaknya lembaga mandiri dan biaya personal untuk gaji pegawai negeri. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kota Surabaya lebih mementingkan biaya rutin dalam melakukan kegiatan pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Erlangga Agustino Landiyanto. (2005). *Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Surabaya*. CURES Working Paper 05(01).
- Ferani Ingrid Tiara, Candra Fajri Ananda. (2008). *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Timur*.
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hayati Hehamahua. (2014). *Analisis APBD Kota Surabaya Suatu Kajian Kemandirian Dan Efektifitas Keuangan Daerah*. Media Trend, 9 (1), 54-68.
- Joko Pramono. (2014). *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta)*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 7(13).
- Karlina, A. (2017). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan APBD Kota Surabaya Tahun 2012-2015*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 6 (3), 601-613.
- Marratus Sholikhah. (2015). *Analisis Rasio untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Muhammad Yasin, Kasino. (2018). *Analisis Pengaruh pada Anggaran dan Belanja Pembangunan terhadap Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten dan Kota Se-Jawa Timur*. Jurnal Ekonomi & Bisnis, 3 (2), 777 – 790.
- Reza Marizka. (2014). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota Disumatera Barat (Tahun 2006-2011)*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Riri Septyaningrum Putri. (2018). *Analisis Tingkat Efektivitas, Kemandirian dan Desentralisasi Keuangan Daerah menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2008-2017)*.
- Yeni Dwi Ningtias, Tatas Ridho Nugroho, Nur Ainayah. (2017). *Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012-2016*.
- Wahyuddin, Nora Sugianal. (2017). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 5(1), 51-60.